



PIDATO REKTOR

Wisuda Periode I Tahun 2016

TEMA:

“PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
INDONESIA
DI ERA MASYARAKAT
ASEAN”

5 April
2016

Universitas Terbuka Convention Center
(UTCC)
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Pamulang, Tangerang Selatan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK



**PIDATO REKTOR
PADA WISUDA PERIODE I
TANGGAL 5 APRIL 2016**

Yang terhormat,
Anggota Senat Universitas Terbuka,
Wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan,
Tam undangan serta keluarga wisudawan yang
berbahagia.

*Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua*

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat dengan suasana hati yang penuh dengan kebahagiaan untuk mengikuti Wisuda Periode I pada hari ini Selasa, 5 April 2016. Kita patut bersyukur dan berbahagia, karena selama lebih dari tiga dasawarsa Universitas Terbuka (UT) telah melaksanakan amanah dari pemerintah untuk melayani dan mencerdaskan masyarakat, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. UT telah melewati sebuah masa yang sangat penting dalam perjalanan sebuah

perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT terus berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan mandiri melalui pendidikan tinggi yang mengedepankan fleksibilitas, keterbukaan, dan kualitas. Pada suasana yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat atas kelulusan Saudara sekalian, dan selamat atas diraihnya kualifikasi akademik sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Kualifikasi dan gelar akademik ini sudah selayaknya Saudara peroleh melalui perjuangan keras dan pantang menyerah selama menyelesaikan studi di UT. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga wisudawan yang sudah pasti mempunyai andil besar dalam membangun ketangguhan belajar dan keberhasilan Saudara.

Tema Wisuda Periode I adalah “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di Era Masyarakat ASEAN” yang kami pandang relevan dengan situasi dan kondisi terkini. Seperti yang diberitakan berbagai media, bahwa pembangunan sosial, ekonomi dan politik masih belum memenuhi harapan kita semua., Hal ini diindikasikan dari masih rendahnya kualitas SDM di

Indonesia. Kita perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh dan mengambil langkah perbaikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik, antara lain dengan melakukan kolaborasi yang baik antara otoritas negara dan para pelaku usaha, membenahi infrastruktur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan), serta meningkatkan kemampuan serta daya saing SDM di era masyarakat ASEAN.

Anggota Senat, wisudawan, dan tamu undangan yang saya hormati,

Masyarakat Asean memiliki tiga pilar meliputi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, dan Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Salah satu pilar yang penting adalah pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang merupakan integrasi/penyatuan kegiatan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN, dimana kegiatan perdagangan dan ekspor impor antarnegara, termasuk keluar masuknya tenaga kerja dan penanaman modal/investasi antarnegara di ASEAN, menjadi mudah.

Berdasarkan *ASEAN Economic Community Blueprint*, MEA dijadwalkan untuk mulai berlaku pada awal 2016. Dengan diberlakukannya MEA, diharapkan ASEAN menjadi kawasan yang:

1. Memiliki daya saing yang tinggi terhadap kawasan besar lainnya, seperti China, India, atau Uni Eropa, 2. Memiliki pembangunan ekonomi yang merata, dan 3. Terintegrasi langsung dengan ekonomi global. Dengan bebasnya tenaga kerja, investasi, barang, dan jasa untuk berpindah dari satu negara ke negara lain di kawasan ASEAN, maka diharapkan bahwa tiap-tiap negara akan saling melengkapi dan memperkuat ekonominya, dan pada akhirnya meningkatkan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN secara keseluruhan.

Pilar pertama AEC *Blueprint* berupaya menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Adapun capaian yang ingin diperoleh adalah pasar dengan aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga terampil dan terdidik, serta aliran modal yang lebih bebas di kawasan ASEAN. MEA juga menyepakati tiga komitmen lainnya, yakni pertama, ASEAN sebagai kawasan ekonomi berdaya saing tinggi yang memiliki kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan intrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*. Kedua, ASEAN sebagai kawasan yang pembangunan ekonominya merata dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah, serta prakarsa mengurangi

kesenjangan pembangunan di ASEAN khususnya untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam). Ketiga, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global melalui pendekatan ekonomi yang koheren dalam hubungan ASEAN dan mitranya di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Sasaran utama dari pembentukan MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang makmur dan berdaya saing dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN. MEA juga bertujuan agar masyarakat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk mempermudah implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah dikomitmenkan, mempercepat integrasi untuk sektor-sektor prioritas; mempermudah perpindahan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat; serta memperkuat mekanisme institusi ASEAN. Apa harapan dari pelaksanaan MEA? Bergulirnya MEA diharapkan sebagai upaya negara anggota ASEAN untuk saling menyesuaikan cara pandang di antara sesama negara Asia Tenggara agar lebih terbuka membahas permasalahan

domestik yang berdampak kepada kawasan. Keterbukaan tersebut tentunya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog, dan konsultasi.

Anggota Senat, wisudawan, dan tamu undangan yang berbahagia,

Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi MEA? Hasil survei World Bank dengan judul *Ease of Doing Business 2016* yang dirilis beberapa bulan lalu, menyatakan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia meningkat sebelas peringkat dari peringkat ke-120 menjadi peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Kemudahan bisnis di Indonesia akan mendorong para pengusaha dari dalam maupun luar negeri untuk memulai bisnis ataupun melakukan ekspansi bisnis di Indonesia.

Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan ada 37.991 kunjungan warga negara asing (WNA) ke Indonesia untuk waktu singkat atau kurang dari setahun. Dari angka tersebut, WNA yang berkunjung tidak untuk bekerja tercatat sejumlah 12.754 kunjungan, dan yang bekerja paruh waktu tercatat dalam 25.238 kunjungan. Pada bulan sebelumnya, jumlah WNA yang berkunjung untuk bekerja paruh waktu

tercatat dalam 14.550 kunjungan. "Dibandingkan dengan Desember 2015 atau sebulan sebelumnya, WNA yang berkunjung untuk bekerja paruh waktu jumlahnya melonjak 73,46 persen," jika dibandingkan tahun lalu, naiknya tajam sampai 69,3 persen. Jangan sampai kemudahan bisnis yang telah diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia justru lebih dimanfaatkan negara lain dalam berbisnis di Indonesia dengan tetap membawa tenaga kerja terampil dari negaranya, sementara warga negara Indonesia tidak bisa bersaing dengan warga negara asing lainnya. Sehingga peran pemerintah dituntut untuk berbuat dalam memproteksi tenaga-tenaga kerja Indonesia.

Anggota Senat, wisudawan, dan tamu undangan yang kami hormati,

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan upaya peningkatan kesiapan SDM Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah terhitung tanggal 17 Januari 2012 lalu, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang di dalamnya antara lain mengatur tentang: jenjang, penyetaraan, dan penerapan kualifikasi SDM Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau *Indonesian Qualification Framework* adalah kerangka

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi merefleksikan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diperoleh seseorang melalui jalur: (1) pendidikan; (2) pelatihan; (3) pengalaman kerja, dan (4) pembelajaran mandiri. Hadirnya peraturan ini tentu bukan dimaksudkan untuk membuat stratifikasi sosial (*pengkastaan*) baru di tengah-tengah masyarakat kita, melainkan untuk dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

Fasli Jalal (2010) pernah mengatakan bahwa KKNi dapat membangun kesadaran mutu para penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan kualitas SDM yang sesuai dengan deskriptor kualifikasi dan menjadi pondasi pengakuan, akses, dan kolaborasi SDM di dunia Internasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, melalui KKNi diharapkan dapat mendorong terbangunnya *country education profile* dengan

data yang komprehensif. Dengan adanya KKNi ini akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, nonformal, informal atau otodidak) yang akuntabel dan transparan. Dengan diimplementasikan KKNi ke dalam kurikulum diharapkan akan dapat menyelaraskan kompetensi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN.

Dalam rangka membangun kesadaran mutu para penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan kualitas SDM, pemerintah telah menyiapkan landasan yang kuat dalam membangun SDM berpendidikan tinggi, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk:

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

2. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Pemberlakuan MEA merupakan momentum yang baik untuk melakukan perbaikan-perbaikan, khususnya pada sektor pendidikan agar Indonesia mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi. Bersamaan dengan program pemerintah UT telah memulai proses penyesuaian kurikulum program studi di UT dengan ketentuan yang ada pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan berubahnya kebutuhan pasar tenaga kerja regional, UT juga akan membekali seluruh mahasiswa dengan kemampuan berbahasa asing (khususnya Bahasa Inggris), keterampilan teknologi komunikasi dan informasi, kemampuan belajar mandiri serta

kewirausahaan (*entrepreneurship*) sebagai *foundation courses* bagi mahasiswa UT. Melalui penyesuaian ini diharapkan lulusan UT memiliki kompetensi yang lebih kompetitif baik di pasar tenaga kerja Indonesia maupun di Asean.

Sebagai salah satu kepercayaan dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan UT juga akan melakukan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan meliputi: kebidanan, keperawatan dan ahli farmasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi ketentuan perundangundangan dan kemampuan berkompetisi dengan tenaga kesehatan dari negara Asean lainnya. Disamping hal tersebut sebagai upaya untuk membangun *critical mass* terkait MEA, UT bekerja sama dengan UNESCO menawarkan *Massive Open and Online Courses* (MOOCs) dengan topik "*Asean Integration: Opportunities and Challenges*". Program *MOOCs ASEAN Studies UT-UNESCO* yang ditawarkan sejak 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang MEA bagi seluruh masyarakat ASEAN maupun di luar ASEAN.

*Anggota Senat, wisudawan, dan tamu undangan
yang saya muliakan,*

Sebagai bagian dari kaum intelektual, saya mengajak para wisudawan yang saya banggakan untuk mau dan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada akhirnya saya sampaikan selamat kepada Saudara-saudara yang hari ini diwisuda.

Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Tangerang Selatan, Selasa 5 April 2016

Rektor,



Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D
NIP 19620401 198601 2001

Rujukan:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/01/16335541/Pekerja.Asing.Serbu.Indonesia.Pemerintah.Diminta.Lakukan.Antisipasi>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/27/180511111/Puan.Jangan.Sampai.Lapangan.Kerja.Kita.Dinikmati.Asing>

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/daya-saing-sumber-daya-manusia-indonesia-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 *Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 *Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*